

# ANALISIS PERINGKAT DAYA SAING SEKTOR USAHA DAN PENERAPAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA SEMARANG

Artiningsih dan Wiwandari Handayani \*)

## Abstrak

Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dianggap sebagai strategi yang tepat untuk diterapkan bagi situasi perekonomian di Kota Semarang karena selain mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi juga dapat mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi. Visi Kota Semarang menekankan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pembangunan ekonomi, untuk itu dibutuhkan kajian yang dapat mengidentifikasi sub sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak ekonomi utama beserta gambaran daya saingnya. Daya saing sektor perdagangan dianalisis pada variabel lingkungan usaha, dinamika usaha, inovasi usaha, dan efektifitas pemerintah. Studi ini menemukan bahwa usaha dengan peringkat daya saing tertinggi terdapat pada perdagangan batik, obat, consumer goods dan kerajinan kaligrafi. Peringkat daya saing yang cukup tinggi pada perdagangan buku, kertas dan usaha foto copy. Hal ini membuka peluang bagi Kota Semarang untuk meningkatkan perannya sebagai Kota Pendidikan atau Kota Perkantoran.

**Kata kunci** : sektor ekonomi, perdagangan dan jasa

## Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada saat ini sangat diperlukan bagi pembangunan kota. Masalah-masalah yang melekat dalam pembangunan kota seperti melimpahnya angkatan kerja, sedikitnya lapangan kerja, dan menjamurnya kemiskinan menjadi faktor pendorong bagi percepatan pembangunan ekonomi. Walau demikian, tidak selalu pertumbuhan ekonomi akan mampu menjadi strategi yang mampu mengatasi masalah-masalah klasik di atas. Pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan potensi dan sumberdaya yang berasal dari luar (*exogenous*) akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun seperti ini tidak menciptakan dampak bagi kemandirian dan ketahanan ekonomi secara mendasar.

Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan salah satu strategi yang dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama mampu mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi. Disisi lain usaha kecil dan menengah (UKM) sejauh ini dianggap sebagai instrumen yang penting dalam menciptakan lapangan kerja. UKM terdiri dari pengusaha mikro (termasuk petani) hingga pabrikan lokal merupakan inti pembangunan ekonomi lokal. Bahkan UKM secara nasional potensial untuk menyediakan lebih dari 90% pekerjaan, menyediakan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari, dan dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara untuk

mendanai pelayan dasar masyarakat akan kesehatan dan pendidikan (GTZ-red, 2006).

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki keragaman sektor usaha. Namun sejauh ini belum teridentifikasi diantara sektor usaha tersebut yang memiliki potensi daya saing untuk ditindaklanjuti lebih nyata sebagai ikon PEL di Kota Semarang. Apabila visi Kota Semarang sebagai "Kota Metropolitan Berbasis Perdagangan dan Jasa yang Religius" ditinjau lebih lanjut maka sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor yang harus ditangani dengan lebih baik. Pengembangan sektor ini juga relevan dengan peran Kota Semarang sebagai kota transit dalam jejaring hubungan wilayah di sepanjang Pantura Jawa dan dalam jejaring hubungan dengan Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah barat. Sub-sektor perdagangan dan jasa seperti hotel, rumah makan, restoran, dan kuliner merupakan dengan demikian merupakan usaha-usaha yang harus dianalisis lebih lanjut sehingga akar usahanya dapat menyentuh perkembangan ekonomi lokal.

Upaya penilaian daya saing sektor ekonomi bagi sektor usaha/ekonomi sangat relevan dengan agenda dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang sedang menggalakkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi penduduk di Kota Semarang melalui PEL.

\*) Staf Pengajar Jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah Universitas Diponegoro Semarang

Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk menindaklanjuti harapan tersebut, terutama dalam rangka memperjelas seperti apa daya saing sektor-sektor ekonomi yang telah berkembang di Kota Semarang pada saat ini, sehingga dapat diperoleh panduan dalam penerapan kebijakan PEL secara nyata. Atas dasar inilah kegiatan **Analisis Peringkat Daya Saing Sektor Usaha dan Penerapan Kebijakan PEL Kota Semarang** perlu untuk segera dilakukan.

### **Konsep Daya Saing Usaha**

Stern 2002 dalam ADB (2005) menyebutkan bahwa iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Pola umum yang terjadi jika iklim bisnis tidak kondusif maka akan terjadi penurunan investasi dan berujung pada penurunan pendapatan daerah. Sedangkan khusus untuk Indonesia selama satu dasawarsa terakhir ini, angka pengangguran sepertinya tidak terpengaruh dan terus tinggi. Iklim bisnis yang tidak kondusif berarti menjadi kondisi yang akan turut memperparah kondisi pengangguran di Indonesia.

Studi yang dilakukan oleh ADB (2005) telah menghasilkan sejumlah fakta-fakta yang terbukti menghambat sektor bisnis di Indonesia. Mengingat bahwa studi tersebut menggunakan sampel yang representatif, sangat besar sekali kemungkinan bahwa fakta-fakta tersebut berlaku juga bagi sektor bisnis di Kota Semarang

Studi mengenai iklim investasi di kota - kota di Indonesia juga dilakukan oleh Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI). Berdasarkan studi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, persepsi perusahaan dalam iklim investasi di Indonesia selama kurun satu semester terakhir (akhir 2005 hingga pertengahan 2006) untuk sebagian besar indikator makin menghambat dunia usaha. Hal ini berarti tekanan dalam perekonomian dari instabilitas nilai tukar, peningkatan inflasi dan tingkat suku bunga, dan peningkatan harga BBM hanya sedikit menjadi perhatian dunia usaha. Beberapa indikator mikroekonomi terkait dengan dunia usaha makin memburuk. transportasi, listrik dan peraturan ketenagakerjaan dianggap makin menghambat. Bagi usaha (perusahaan) baru, peraturan dan perijinan yang diperlukan untuk memulai suatu usaha sangat membingungkan dan inkonsisten antara satu ijin dengan ijin lainnya, antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar daerah. Tidak saja implementasi pelayanan satu atap, tetapi juga perlunya koordinasi antar instansi kementerian teknis yang membawahi pengeluaran ijin untuk menghindari tumpah tindih peraturan dalam pendaftaran usaha baru.

Daya saing sektor perdagangan akan dianalisis dengan sejumlah variabel yang telah dirumuskan oleh GTZ-red (2006)

### **VARIABEL DAYA SAING**

- **Lingkungan usaha**, terkait dengan (i) prospek masa lalu (kondisi sub-sektor perdagangan sekitar dua tahun lalu), (ii) prospek masa depan (kondisi sub-sektor perdagangan pada masa yang akan datang), (iii) kesulitan rintangan usaha, (iv) masalah terkait dengan pemasaran, distribusi, dan pengadaan, (v) masalah terkait dengan tenaga kerja, dan (vi) ketersediaan bergabung dengan asosiasi bisnis perdagangan.
- **Dinamika Usaha**, terkait dengan (i) pelaku bisnis pemula (% pengusaha yang masuk sub-sektor tersebut kurang dari 10 tahun), (ii) kapasitas pelibatan tenaga kerja (% usaha dengan tenaga kerja kurang dari 20 orang), (iii) produktivitas pemasaran, distribusi, dan pengadaan (% usaha dengan omset diatas 500 juta), (v) keinginan menggunakan kredit, (vi) kesediaan untuk mengajukan kredit, (vii) perbandingan modal dan utang, (viii) bentuk hukum, (ix) kapasitas manajerial (% usaha dengan pemilik lulus akademi dan universitas)
- **Inovasi Usaha**, terkait dengan (i) inovasi dalam pemasaran atau promosi, (ii) inovasi dalam penjaminan kepuasan konsumen, (iii) kemampuan dalam menggunakan jasa seperti: konsultasi, pelatihan pemasaran, hukum, akuntansi, manajemen yang merepresentasikan keinginan sektor usaha dalam meningkatkan inovasi.
- **Efektivitas Pemerintah**, terkait dengan (i) konsistensi kebijakan sub-sektor perdagangan yang dibuat oleh pemerintah, (ii) korupsi/ pembayaran informal, (iii) kepastian hukum/ kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku, (iv) tingkat atau derajat dampak peraturan pada sub-sektor perdagangan, (v) formalisasi usaha (% usaha yang terdaftar), dan (vi) kesadaran tentang peraturan.

*Sumber : GTZ-red (2006)*

### **Pengembangan Ekonomi Lokal**

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan urgensi/kebutuhan yang sangat diperlukan secara nasional baik oleh daerah maju maupun daerah yang relatif tertinggal. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya sistem pemerintahan yang terdesentralisasi sehingga

tidak memungkinkan adanya pembangunan ekonomi setiap daerah secara terpusat oleh pemerintah pusat. Selain itu, keterbatasan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah memerlukan strategi untuk mengoptimalkan sumberdaya dan dana serta menggerakkan ekonomi lokal melalui peningkatan peran swasta (dunia usaha) dan masyarakat melalui kerangka regulasi, kerangka investasi dan pelayanan publik. Menurut Zaaijer dan Sara, 1993, PEL merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah lokal atau kelompok masyarakat untuk mengatur sumber daya dalam kesepakatan kerjasama dengan sektor swasta ataupun pihak lain sehingga mampu menstimulasi pembangunan ekonomi di daerahnya. Penekanan PEL terletak pada pembangunan kearifan lokal yang dimiliki sebagai contoh kebijakan yang menggunakan potensi masyarakat lokal, institusi dan sumberdaya fisik.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu bentuk proses pembangunan masyarakat, yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri alternatif dan perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk/jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih iptek dan pengembangan usaha baru. Isu utama pembangunan ekonomi dalam konsep pengembangan ekonomi lokal merupakan formulasi kebijakan – kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan atau karakteristik khusus yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. PEL memiliki beberapa aspek utama yaitu proses manajemen, kelompok sasaran, faktor lokasi, kesinergian dan fokus kebijakan, pembangunan berkelanjutan, dan tata pemerintahan.



Sumber: Hariyoga, 2007

**Gambar 1**  
**Aspek Utama (Heksagonal) PEL**

Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal terdapat dalam RPJM Nasional. RPJM Nasional memuat rencana pembangunan lima tahun berdasarkan 3 (tiga) agenda pokok pembangunan yang dijabarkan dalam bab-bab yang berupa isu-isu pokok pembangunan (*issues based*, bukan *sectoral based*).

#### ARAH KEBIJAKAN PEL

- Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, terutama kawasan-kawasan di luar pulau Jawa dan Bali
- Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasukan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan) dan jasa penunjang
- Penguatan rantai pasokan bagi industri perdesaan dan penguatan keterkaitan produksi berbasis sumber daya lokal
- Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan
- Pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan
- Pengembangan jaringan kerjasama usaha
- Pengembangan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga
- Pengembangan sistem outsourcing dan sub kontrak dari usaha besar ke UMKM dan koperasi di kawasan perdesaan
- Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan
- Perluasan pasar dan peningkatan promosi produk – produk perdesaan
- Peningkatan pelayanan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan mikro, kepada pelaku usaha di perdesaan
- Peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha (BDS providers) untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal

Sumber : RPJM Nasional

#### Pembelajaran Studi Kasus

Pembelajaran dari beberapa studi kasus di negara lain dilakukan sebagai tolak ukur keberhasilan maupun komparasi dengan kondisi Kota Semarang dalam upaya peningkatan daya saing sektor usaha dan penerapan kebijakan pengembangan ekonomi lokalnya. Studi kasus tersebut diharapkan dapat memberikan input yang cukup signifikan baik dalam proses identifikasi, analisis maupun penetapan rekomendasi studi. Beberapa studi kasus yang dijadikan pembelajaran diantaranya China, Limpopo, Grimsby, serta India. Beberapa hal yang dapat dijadikan pembelajaran terkait dengan bagaimana proses inisiasi yang dilakukan beberapa kota tersebut dalam membangun iklim usaha dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki. Selain itu beberapa kasus menekankan pada pentingnya infrastruktur dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing usaha, sementara disisi lain, dukungan kebijakan pemerintah lokal juga memiliki andil yang cukup besar disamping adanya inovasi teknologi.

#### Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya:

- Sub-sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak ekonomi utama yang ada di Kota Semarang
- Gambaran daya saing sub-sektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang
- Sub-sektor perdagangan jasa di Kota Semarang yang potensial untuk ditetapkan sebagai ikon PEL di Kota Semarang
- Rekomendasi langkah-langkah kebijakan PEL pada sektor usaha perdagangan jasa terpilih pada butir (3)

Adapun sasaran kegiatan adalah :

- Tersedianya daftar (*list*) sektor usaha (pada sub-sektor perdagangan jasa) yang berkembang di Kota Semarang dan instrumen untuk menilai keutamaannya dalam konteks PEL.
- Tersedianya analisis daya saing sektor usaha.
- Tersedianya butir-butir rekomendasi bagi pengembangan sektor usaha yang menjadi ikon PEL Kota Semarang

### **Ruang Lingkup Studi**

Lingkup spasial penelitian ini adalah wilayah administratif Kota Semarang. Sedangkan secara substansial, ruang lingkup studi ini adalah :

- Dalam analisis ini sektor usaha/ ekonomi yang dikaji adalah sub-sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak ekonomi utama yang sesuai dengan visi Kota Semarang, yang diantaranya adalah: (1) hotel, (2) rumah makan dan restoran, (4) jasa hiburan, dan (4) jasa boga. Namun demikian, sektor usaha ini masih tentative dan akan disesuaikan dengan data-data yang relevan.
- Kajian daya saing sektor usaha akan dianalisis dari beberapa sudut pandang yang disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh GTZ-red (2006). Adapun daya saing sektor dalam kajian ini merupakan skoring atas:
  - a. Lingkungan usaha
  - b. Dinamika usaha
  - c. Inovasi usaha
  - d. Efektivitas pemerintah
- Rekomendasi PEL atas sektor ekonomi terpilih dikontekstualisasikan menurut koridor kegiatan-kegiatan pokok pengembangan ekonomi lokal yang telah dirumuskan oleh Bappenas (2007).

### **Metodologi**

Mengingat bahwa tujuan utama studi ini ialah untuk: (1) mengetahui kondisi daya saing melalui penilaian sub-sektor perdagangan dan jasa yang potensial melalui sejumlah variabel yang telah ditetapkan di awal (lihat GTZ red, 2006) dan

(2) merekomendasikan langkah pengembangan PEL pada salah satu sektor usaha terpilih dengan “resep-resep” yang telah ditetapkan secara generik (lihat Bappenas, 2007) maka pendekatan yang paling tepat bagi studi ini adalah pendekatan positivistik. Pendekatan positivistik adalah salah satu pendekatan penelitian yang secara dominan menyandarkan diri pada teori-teori relevan yang telah berkembang. Pendekatan positivistik berasumsi bahwa kondisi empirik yang menjadi fokus penelitian memiliki kesamaan atau homogenitas dengan teoritisasi ilmiah yang terkait.

Populasi yang dimaksud adalah himpunan pelaku usaha dalam sub sektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang. Teknik Sampling yang digunakan adalah random sampling dengan kriteria keterwakilan. Mengingat perlu ada keterwakilan dari setiap kelompok usaha dalam sub sektor perdagangan dan jasa. Dengan demikian akan dapat diperoleh gambaran karakteristik pelaku usaha secara lengkap. Secara garis besar kategori atau strata kelompok usaha akan dilihat berdasarkan jenis komoditas perdagangan atau jasa yang dilakukan.

Interpretasi data dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif maupun kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan melalui analisis distribusi frekuensi, antara lain untuk menggali informasi berdasarkan data dari kuesioner yang disebarkan ke pelaku usaha. Variabel analisis difokuskan pada daya saing yang akan meliputi lingkungan usaha, dinamika usaha, inovasi usaha serta efektivitas pemerintah.

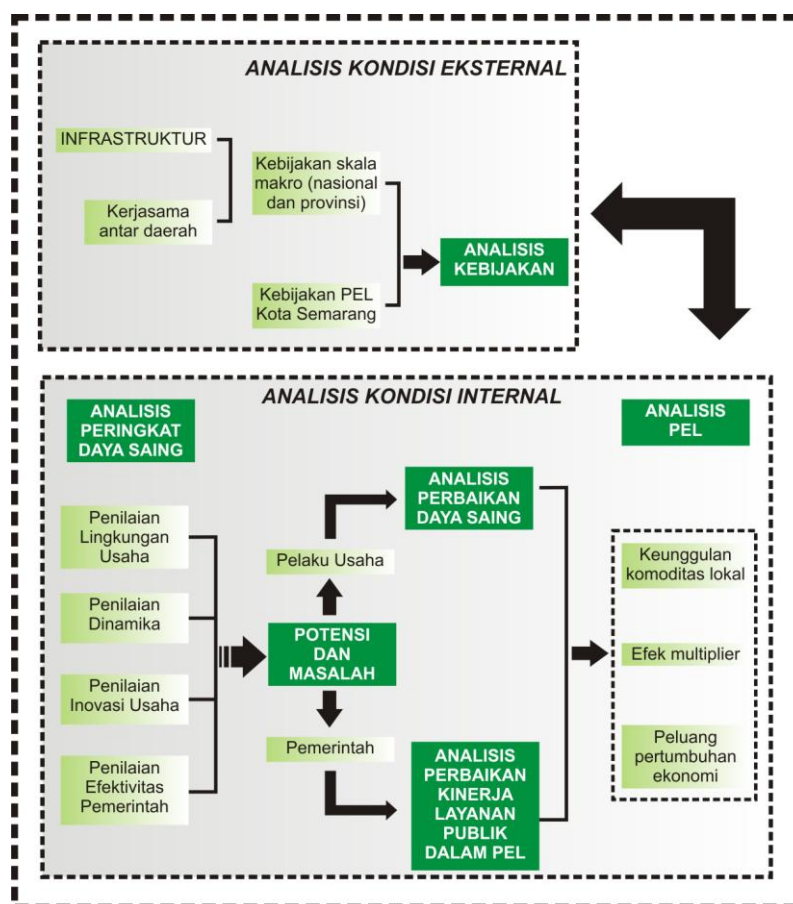
Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan analisis komparasi tiap variabel, melalui karakteristik potensi dan masalah serta skoring dalam pemeringkatan daya saing. Analisis implikasi potensi dan masalah yang dihadapi pelaku usaha dan pemerintah dalam konteks pengembangan ekonomi lokal disintesis dengan mengkaji keunggulan komoditas lokal, serta dorongan terhadap munculnya pertumbuhan ekonomi akibat efek multiplier baik dari aspek penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan pendapatan masyarakat dan Kota Semarang.

Teknik analisis yang digunakan menggunakan teknik skoring melalui penilaian jawaban responden menurut variabel lingkungan usaha, inovasi usaha, dinamika usaha dan efektivitas pemerintah. Penilaian masing – masing variabel tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan menggunakan skala guttman dan linkert. Skala guttman digunakan dalam jawaban yang merepresentasikan ya dan tidak sedangkan skala linkert digunakan dalam jawaban yang beragam

Penilaian dari masing – masing variabel kemudian disimpulkan untuk didapatkan peringkat komoditas masing – masing usaha dalam subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang.

Proses analisis dalam studi ini terbagi dalam dua item analisis utama yaitu analisis mengenai kondisi internal dan kondisi eksternal. Analisis

mengenai kondisi eksternal dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam peningkatan daya saing dan kebijakan mengenai kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Analisis kondisi internal terdiri dari analisis mengenai peringkat daya saing dan analisis mengenai pengembangan ekonomi lokal.



**Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal**

Pengembangan ekonomi lokal Kota Semarang perlu dukungan kebijakan lokal yang mampu menstimulasi pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan-kebijakan yang ada tersebut harus sesuai dengan kebutuhan yang mendukung pengembangan lokal Kota Semarang itu sendiri sehingga sesuai dengan kandungan lokal yang dimiliki. Dalam menciptakan kondisi yang mampu mendukung pengembangan lokal salah satunya diperlukan kebijakan pemerintah yang didukung dengan kejelasan dan efektivitas

peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil. Akan tetapi kondisi kebijakan pemerintahan yang terdapat di Kota Semarang belum mampu mendukung mengembangkan ekonomi lokal yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa responden terkait yang menunjukkan bahwa masih belum adanya koordinasi antar pemerintah terkait.

**Tabel I  
Rumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal**

No	Kebijakan	Kebutuhan	Kenyataan
1.	Pemangkasan proses perijinan investasi	Peningkatan peran swasta (dunia usaha) dan masyarakat melalui kerangka regulasi, kerangka investasi dan pelayanan publik	Perijinan Terkait Dukungan dalam Sektor Perdagangan dan Jasa di Semarang Masih Belum Efektif.
2.	Peningkatan keterpaduan antar lembaga pembina, dunia usaha, dan masyarakat	Melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah tertentu	Kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, maupun organisasi masih belum terjalin koordinasi yang baik dan saling mendukung.
3.	Pengembangan SDM sektor industri dan perdagangan secara intensif melalui transformasi teknologi	Peningkatan kandungan lokal, masyarakat lokal dan dunia usaha lokal	Peningkatan SDM pelaku usaha dalam subsektor perdagangan dan jasa dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan SDM masih belum tepat sasaran sehingga kegiatan yang dilaksanakan sia-sia
4.	peningkatan daya saing produk UKM		
5.	Pengembangan kawasan Joglosemar (Yogyakarta, Solo, dan Semarang)	Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis	Kerjasama antar daerah yang dijalin masih belum mampu mengembangkan potensi lokal Kota Semarang.
6.	Penciptaan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi	Iklim investasi yang ada di Kota Semarang dapat dikatakan cukup bagus, tetapi kondisi tersebut terganjal dengan proses perijinan yang belum efektif.
7.	Pembangunan kemitraan	Penerapan kerjasama yang tepat terutama dalam pengembangan jaringan	Pembangunan Kemitraan Dalam Upaya Pengembangan Lokal Kota Semarang telah dilakukan baik pengembangan jaringan antar pemerintah dan pengusaha maupun antara pemerintah dengan pengusaha. Pembangunan kemitraan yang dijalin tersebut baik berupa peningkatan SDM maupun <i>sharing</i> teknologi
8.	Kebijakan penggalan potensi wisata	penciptaan investasi lingkungan yang baik dalam mendukung pengembangan lokal	Kebijakan penggalan potensi wisata guna penciptaan lingkungan investasi yang mendukung pengembangan lokal telah dilakukan Kota Semarang. Akan tetapi upaya tersebut kurang didukung dengan adanya proses perijinan dan infrastruktur yang mendukung.
9.	Kebijakan dalam pemberian bantuan modal	Peran pemerintah terkait dalam membuka pasar, pembangunan hubungan untuk membentuk rekanan dan akses pada bisnis pelayanan pembangunan (Business Development Services), keuangan dan akses pada pasar, dan menciptakan lingkungan	Upaya pemberian bantuan modal di kota Semarang dilakukan melalui pemberian modal bergilir serta juga terdapat bantuan pemasaran. Akan tetapi dalam pemasaran produknya mengalami jalan di tempat karena terkadang terkendala oleh kebijakan sepihak dari pengelola outlet.
10.	Kebijakan bantuan pemasaran		

Sumber : Analisis Penyusun, 2008

### **Peringkat Daya Saing Sub Sektor Usaha Perdagangan dan Jasa**

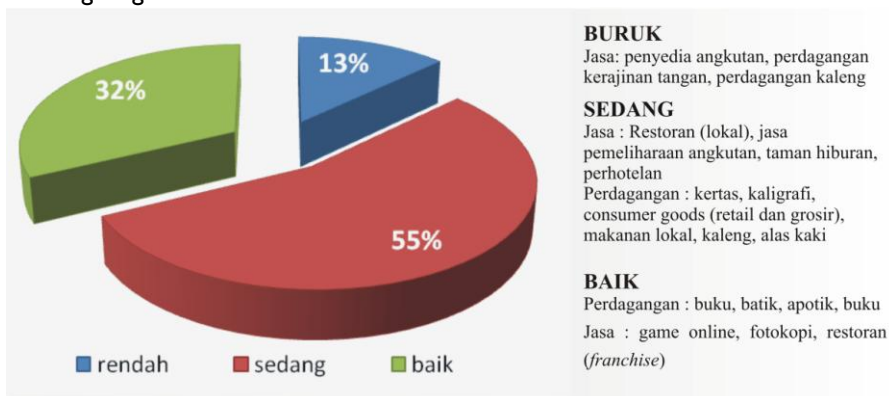
Simpulan penilaian karakteristik subsektor perdagangan dan jasa di kota Semarang didasarkan pada kompilasi keseluruhan variabel penilaian kondisi subsektor perdagangan dan jasa yaitu dinamika usaha, lingkungan usaha, inovasi serta keefektifan pemerintah.

### **Lingkungan Usaha**

Berdasarkan beberapa variabel yang terkait dengan lingkungan usaha yaitu perkembangan usaha, perkiraan perkembangan usaha di masa depan, penyerapan tenaga kerja serta partisipasi dalam asosiasi maka dapat dikategorikan lingkungan usaha subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang, yaitu rendah, sedang dan tinggi (perhitungan lihat di lampiran). Berdasarkan

analisis mengenai lingkungan usaha dapat dikatakan bahwa subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang termasuk dalam kondisi sedang. Kondisi ini dapat diartikan bahwa perkembangan lingkungan usaha subsektor

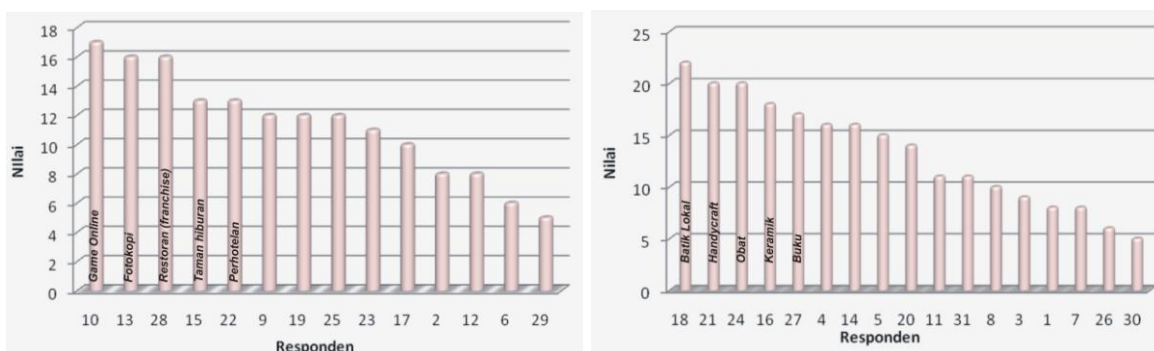
perdagangan dan jasa di Kota Semarang relatif kondusif meskipun belum menunjukkan lingkungan yang mendukung.



**Gambar 2**  
**Kondisi Lingkungan Usaha**

Berdasarkan diagram dapat disimpulkan bahwa lingkungan usaha subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan kedepannya. Hal tersebut dapat terindikasi dari persentase jumlah usaha yang memiliki lingkungan usaha sedang dan baik cukup banyak. Subsektor perdagangan dan jasa yang termasuk lingkungan usaha buruk diantaranya jasa penyedia angkutan, kerajinan tangan dan perdagangan kaleng. Sebagian besar hal tersebut dipengaruhi perkembangan usaha

serta peluang pengembangan usaha kedepan yang kurang baik. Subsektor perdagangan dan jasa yang memiliki lingkungan usaha yang baik diantaranya buku, apotik, game online dan restoran dipengaruhi perkembangan dan peluang usaha yang baik serta tingginya angka penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan pemeringkatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha yang memiliki lingkungan usaha yang baik untuk sektor jasa adalah jasa hiburan game online dan taman hiburan, fotokopi, restoran serta perhotelan



Sumber : Analisis Penyusun, 2008

**Gambar 3**  
**Pemeringkatan Lingkungan Usaha Subsektor Jasa dan Perdagangan**

**Dinamika Usaha**

Kondisi dinamika usaha subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang sudah relatif baik. Berdasarkan analisis (lihat lampiran), sebesar 29% responden memiliki kondisi yang baik, 45% sedang dan 26% buruk. Berdasarkan diagram disamping ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa usaha yang memiliki kondisi dinamika usaha baik

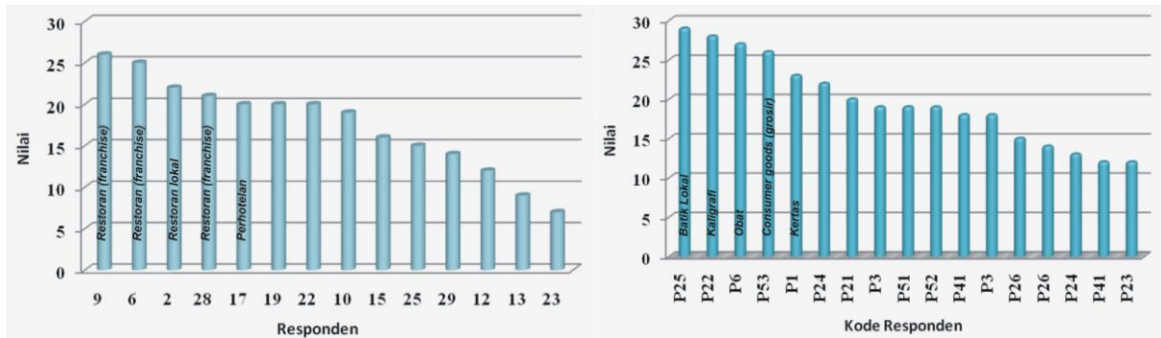
yaitu jasa restoran baik lokal maupun franchise, perdagangan kertas, barang kerajinan maupun consumer goods grosir. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap kondisi dinamika usaha tersebut diantaranya promosi yang dilakukan, distribusi usaha serta upaya memperbesar usaha melalui penambahan modal dengan kredit.

**Analisis Peringkat Daya Saing Sektor Usaha Dan Penerapan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Semarang**

(Artiningsih dan Wiwandari Handayani)

Berdasarkan pemeringkatan, dapat disimpulkan bahwa jasa yang memiliki dinamika usaha yang baik adalah jasa restoran baik lokal maupun franchise dan jasa perhotelan. Pemeringkatan

dinamika usaha untuk sektor perdagangan, perdagangan barang kerajinan batik lokal dan kaligrafi menempati peringkat teratas.



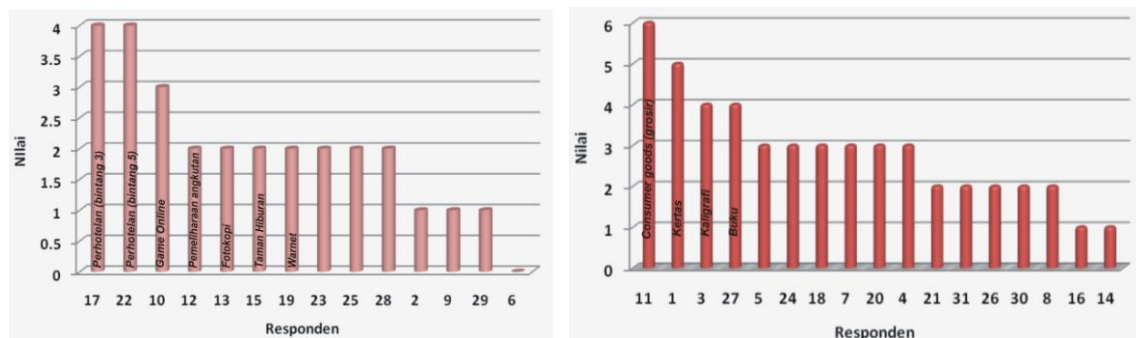
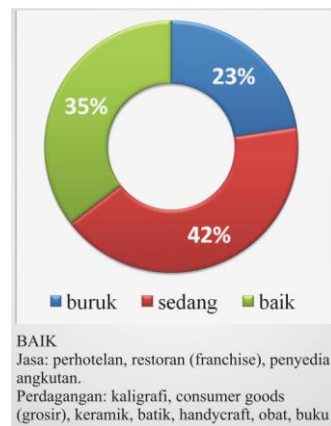
Sumber : Analisis Penyusun, 2008

**Gambar 4**  
**Pemeringkatan Dinamika Usaha Subsektor Jasa dan Perdagangan**

**Inovasi Usaha**

Kondisi inovasi usaha subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang relatif cukup baik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan (lihat lampiran), sebesar 35% responden telah memiliki inovasi usaha yang baik sedangkan 45% sedang dan 23% relatif buruk. Berdasarkan diagram disamping ini, beberapa usaha yang telah memiliki inovasi usaha yang baik diantaranya jasa perhotelan, restoran franchise, penyedia angkutan, keramik, batik, obat dan buku. Kondisi inovasi yang baik tersebut dipengaruhi adanya upaya konsultasi usaha baik dalam bidang manajerial, pemasaran serta adanya inovasi dalam peningkatan SDM. Berdasarkan pemeringkatan kondisi inovasi usaha dapat disimpulkan untuk sektor jasa, komoditas yang memiliki peringkat tinggi antara lain jasa perhotelan, game online,

warnet dan fotokopi. Pemeringkatan inovasi usaha untuk sektor perdagangan, perdagangan consumer goods (grosir) menempati peringkat teratas



Sumber : Analisis Penyusun, 2008

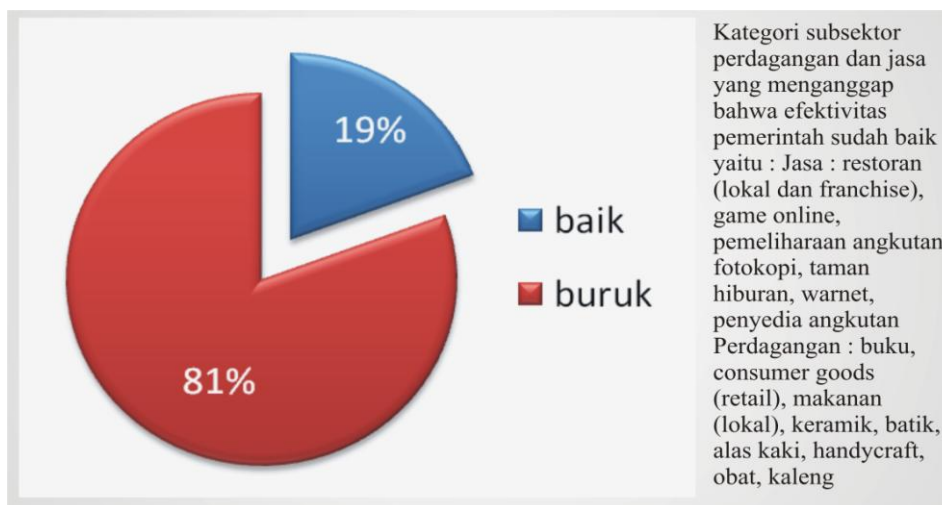
**Gambar 5**  
**Pemeringkatan Inovasi Usaha Subsektor Jasa dan Perdagangan**



### Efektifitas Pemerintah

Berdasarkan simpulan mengenai efektivitas pemerintah dalam mendukung perkembangan subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang, sebanyak 81% responden

buruk. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesulitan dalam perizinan yang cenderung berbelit – belit serta kurang adanya kebijakan yang mendukung pengembangan subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang.

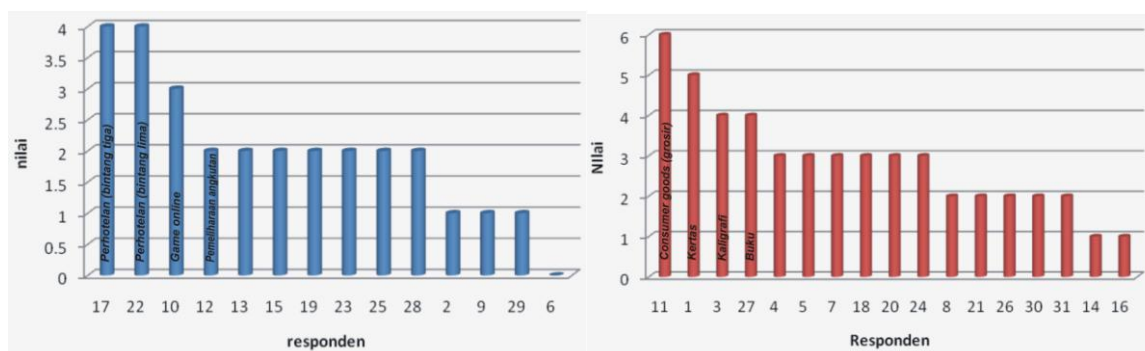


mengatakan bahwa peran pemerintah masih

**Gambar 6**  
**Kondisi Efektivitas Pemerintah Subsektor Jasa dan Perdagangan**

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan beberapa usaha dalam subsektor perdagangan dan jasa yang menganggap bahwa efektivitas pemerintah sudah baik sebagian besar

merupakan usaha dengan komoditas lokal di Kota Semarang seperti batik, makanan dan restoran. *Sumber : Analisis Penyusun, 2008*



**Gambar 7**  
**Pemeringkatan Efektivitas Pemerintah Subsektor Jasa dan Perdagangan**

### Kesimpulan

Penelitian mengenai Analisis Peringkat Daya Saing Sektor Usaha dan Penerapan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Semarang menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- **Kebijakan pengembangan ekonomi lokal**, kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang ada belum mampu menjawab kebutuhan pengembangan ekonomi lokal serta daya saing usaha subsektor perdagangan dan jasa. Kebijakan yang ada

saat ini belum mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kota Semarang khususnya terkait dengan pelayanan publik, infrastruktur serta kerjasama antar daerah.

- **Lingkungan Usaha**, kondisi subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang termasuk dalam kondisi sedang. Kondisi ini dapat diartikan bahwa perkembangan lingkungan usaha subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang relatif kondusif meskipun belum optimal dalam

menunjukkan lingkungan yang mendukung. Subsektor perdagangan dan jasa yang termasuk lingkungan usaha buruk diantaranya jasa penyedia angkutan, kerajinan tangan dan perdagangan kaleng. Sebagian besar hal tersebut dipengaruhi perkembangan usaha serta peluang pengembangan usaha kedepan yang kurang baik. Sedangkan subsektor perdagangan dan jasa yang memiliki lingkungan usaha yang baik diantaranya buku, apotik, game online dan restoran dipengaruhi perkembangan dan peluang usaha yang baik serta tingginya angka penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan pemeringkatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha yang memiliki lingkungan usaha yang baik untuk sektor jasa adalah jasa hiburan game online dan taman hiburan, fotokopi, restoran serta perhotelan sedangkan untuk sektor perdagangan adalah perdagangan barang kerajinan batik lokal, kaligrafi dan handycraft

- **Dinamika Usaha**, kondisi dinamika usaha subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang sudah relatif baik. Berdasarkan analisis sebesar 29% responden memiliki kondisi yang baik, 45% sedang dan 26% buruk. Beberapa usaha yang memiliki kondisi dinamika usaha baik yaitu jasa restoran baik lokal maupun *franchise*, perdagangan kertas, barang kerajinan maupun *consumer goods* grosir. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap kondisi dinamika usaha tersebut diantaranya promosi yang dilakukan, distribusi usaha serta upaya memperbesar usaha melalui penambahan modal dengan kredit. Berdasarkan pemeringkatan, dapat disimpulkan bahwa jasa yang memiliki dinamika usaha yang baik adalah jasa restoran baik lokal maupun *franchise* dan jasa perhotelan. Pemeringkatan dinamika usaha untuk sektor perdagangan, perdagangan barang kerajinan batik lokal dan kaligrafi menempati peringkat teratas.
- **Inovasi Usaha**, kondisi inovasi usaha subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang relatif cukup baik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan (lihat lampiran), sebesar 35% responden telah memiliki inovasi usaha yang baik sedangkan 45% sedang dan 23% relatif buruk. Beberapa usaha yang telah memiliki inovasi usaha yang baik diantaranya jasa perhotelan, restoran *franchise*, penyedia angkutan, keramik, batik, obat dan buku. Kondisi inovasi yang baik tersebut dipengaruhi adanya upaya konsultasi usaha

baik dalam bidang manajerial, pemasaran serta adanya inovasi dalam peningkatan SDM. Berdasarkan pemeringkatan kondisi inovasi usaha dapat disimpulkan untuk sektor jasa, komoditas yang memiliki peringkat tinggi antara lain jasa perhotelan, game online, warnet dan fotokopi. Pemeringkatan inovasi usaha untuk sektor perdagangan, perdagangan *consumer goods* (grosir) menempati peringkat teratas.

- **Efektifitas Pemerintah**, efektivitas pemerintah dalam mendukung perkembangan subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang, sebanyak 81% responden mengatakan bahwa peran pemerintah masih buruk. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesulitan dalam perizinan yang cenderung berbelit – belit serta kurang adanya kebijakan yang mendukung pengembangan subsektor perdagangan dan jasa di Kota Semarang. Beberapa usaha dalam subsektor perdagangan dan jasa yang menganggap bahwa efektivitas pemerintah sudah baik sebagian besar merupakan usaha dengan komoditas lokal di Kota Semarang seperti batik, makanan dan restoran.

### **Rekomendasi**

Hasil penelitian mengenai peringkat daya saing usaha dan kebijakan pengembangan ekonomi lokal, dapat digunakan sebagai upaya pengembangan perekonomian Kota Semarang melalui prioritas perhatian pada pengembangan sektor usaha perdagangan dan jasa yang memiliki peringkat daya saing yang tinggi. Peringkat tertinggi tersebut harus dipertahankan, terutama pada perdagangan batik, obat, grosir *consumer goods* dan kerajinan kaligrafi.

Namun demikian, ada potensi dan peluang pengembangan perdagangan dan jasa yang dapat menunjang peningkatan peran Kota Semarang sebagai Kota Wisata.

Meskipun dalam pemeringkatan daya saing subsektor perdagangan dan jasa yang dimaksud tergolong dalam kategori sedang atau pun rendah, subsektor tersebut juga perlu perkuatan dengan didorong pengembangannya. Hal ini mengingat peran subsektor perdagangan dan jasa tersebut dalam memanfaatkan potensi lokal yang tinggi. Adapun perdagangan dan jasa yang dimaksud adalah perdagangan kuliner melalui restoran lokal dan *franchise*. Sementara Batik, kerajinan dan keramik yang berdaya saing tinggi juga merupakan bagian dari kekayaan lokal Kota Semarang yang mendukung tidak saja usaha perdagangan namun juga usaha pariwisata.

Kota Semarang juga berpeluang dalam meningkatkan perannya sebagai Kota Pendidikan atau Perkantoran. Hal ini ditunjukkan oleh peringkat daya saing yang cukup tinggi dari perdagangan buku, kertas dan usaha foto copy.

Pengembangan peran Kota Semarang dari bertumpu pada perdagangan dan jasa ke peningkatan dan perkuatan peran sebagai Kota Wisata dan Pendidikan/Perkantoran tersebut perlu didukung dengan kebijakan pengembangan yang bertumpu pada potensi lokal yang dimiliki oleh Kota Semarang. Hal ini penting agar dampak ikutan yang timbul dapat meningkatkan perekonomian Kota Semarang.

Reformasi pelayanan publik menjadi penting dilakukan guna meningkatkan efektivitas pemerintah, agar daya saing Kota Semarang dalam pengembangan ekonomi lokal juga meningkat. Adapun pelayanan publik tersebut akan terkait pada peningkatan pelayanan dalam prosedur birokrasi dan perijinan, kualitas dan kapasitas infrastruktur serta kualitas SDM. Penerapan tata kelola pemerintahan (Good Governance) menjadi keharusan dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal maupun daya tarik investasi Kota Semarang, yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan profesionalisme.

Selain itu, upaya pengembangan perekonomian lokal di Kota Semarang perlu didukung penyediaan infrastruktur yang baik untuk menstimulasi peluang pengembangan kedepannya.

Rekomendasi lain terkait dengan adanya studi lanjut yang perlu dilakukan terkait dengan sektor usaha yang menjadi prioritas serta mata rantai pengaruh yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas sektor lain yang juga berpengaruh di Kota Semarang sehubungan dengan peningkatan peran Kota Semarang sebagai kota wisata dan juga pendidikan atau perkantoran.

#### Daftar Pustaka

- ADB. 2005. *Jalan Menuju Pemulihan: Memperbaiki iklim investasi di Indonesia*, Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division.
- BPS Kota Semarang. 2006. *Profil Kegiatan Ekonomi Hasil Sensus Ekonomi Kota Semarang*.
- BPS Kota Semarang. 2006. *Kota Semarang dalam Angka*.
- GTZ red. 2006. *Survei Iklim Usaha Wilayah Subosukowonosraten*. (Laporan Akhir).
- Hariyoga, H. 2007. *Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal*. Makalah Direktorat Perekonomian Daerah Bappenas pada Workshop Nasional dan Pameran

Cluster Uggulan Jawa Tengah 25-26 April 2007. Semarang.

- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006*: tentang Paket Kebijakan Investasi dimana dalam kebijakan tersebut dituangkan berbagai hal yang harus diatur kembali agar iklim investasi di Indonesia dapat tumbuh dan bersaing di skala internasional. Disamping itu peraturan-peraturan daerah (Perda) yang sudah diterbitkan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Baru 2030?*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Kristianto Lilik. 2006. *Forum : Sinergi Joglosemar dan Pelayanan Publik*. Kompas Cetak Edisi Rabu, 24 Mei 2006. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0605/24/jogja/24557.htm> ( 7 Juli 2008).
- LPEM-UI. 2006. *Ringkasan Eksekutif Survei Tahap Ketiga Monitoring Iklim Investasi di Indonesia*. Fakultas Ekonomi UI kerjasama dengan Woldbank
- Mangku. 2005. *Kebijakan Ekonomi : Pemerintah Keluarkan Empat Langkah*. Edisi Kamis, 1 September. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=120014> (7 Juli 2008).
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. [http://www.jawatengah.go.id/framer.php?SUB=prog\\_pemb&SEKTOR=ekbang&DATA=ekbang\\_perdagangan\\_dan\\_industri](http://www.jawatengah.go.id/framer.php?SUB=prog_pemb&SEKTOR=ekbang&DATA=ekbang_perdagangan_dan_industri) (7 Juli 2008).
- Permendagri Nomor 33 Tahun 2007* tentang Tata Cara Penyusunan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Depdagri.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2000-2025*.
- Shaoxing Municipal Government. 2005. *Shaoxing Economic Development Zone*. [www.sx.gov.cn](http://www.sx.gov.cn) (7 Juli 2008).
- Sharma, Sameer. 2003. *Creating Entrepreneurs and Forming Networks in the Weaver Cluster of Pochampalli*. <http://www.competitiveness.org:8080/filemanager/download/333/sharma-weaver-clusters.PDF> (30 Mei 2008).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2006* tentang Investasi.
- Zaaijer, M. dan Sara L.M.1993. *Local Economic Development as an Instrument for Urban Poverty Alleviation*. *Third World Planning Review*. Vol. 15,no.2, hal.127-142.
- Zuhul. 2008. *Kekuatan Daya Saing Indonesia : Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , 2008. *The Limpopo Local Economic Development (LED) Partnership : Reducing Poverty Through Pro-poor Economic Growth*. [www.Limpopoled.com](http://www.Limpopoled.com) (30 Mei 2008).

-----, 2008. *Case Studies: Municipality of  
Grimsby, Humberside, England.*

[www.worldbank.org](http://www.worldbank.org) ( 7 Juli 2008).